

ACEH DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

(Terjemahan makalah dengan judul "The Acheh Question" yang disampaikan di "Konferensi Internasional Masalah Aceh" Di Washington, D.C., Amerika Serikat, tanggal 3 April 1999)

Teuku Haji Ibrahim Alfian*

Proses perkembangan Daerah Aceh serta jati diri penduduknya rasanya perlulah dikemukakan terlebih dahulu sebagai titik tolak dalam memahami topik yang sedang kita bahas ini. Sejarawan terkemuka Amerika Serikat, Allan Nevins, mengemukakan bahwa Sejarah adalah sesungguhnya jembatan yang menghubungkan masa lampau dengan masa kini dan menunjukkan jalan ke masa depan. Bila kita melihat ke Sejarah Aceh akan tampak kepada kita betapa agama amat berpengaruh dalam kehidupan orang-orang Aceh.

I

Pasai, yang terletak di Aceh Utara sekarang ini dan berada di garis pantai barat Selat Melaka adalah kerajaan pertama di Asia Tenggara yang memeluk agama Islam. Meskipun dikenal dengan nama Pasai dalam teks-teks Melayu dan sumber-sumber Portugis, pelabuhan itu diberi nama "Samudera" oleh pedagang-pedagang India, yang pada akhirnya nama itu menjadi nama Pulau Sumatra. Antara tahun 1290 dan 1520 Kerajaan Pasai, yang dalam *Hikayat Raja-Raja Pasai* disebut

juga dengan nama Samudera Darussalam, tidak saja memiliki kota dagang yang penting di Selat Melaka, tetapi juga menjadi pusat perkembangan Islam serta bahasa dan kesusasteraan Melayu.

Hikayat Raja-raja Pasai yang tertulis dalam Bahasa Melayu Klasik atau disebut juga Bahasa Jawi Pasai, menurut Dr. A. H. Hill dikarang sekitar tahun 1360, dan *Hikayat* itu jelas menghasilkan gaya sastra Melayu yang pertama yang ekspresi sepenuhnya satu abad kemudian ditemukan dalam Kitab *Sejarah Melayu*. Jelas tampak, tulis Hill, pengaruh *Hikayat Raja-Raja Pasai* kepada *Sejarah*

* Prof. Dr. Teuku Haji Ibrahim Alfian, M.A. adalah Gurubesar Sejarah di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Sanata Dharma

Melayu, dan kepada teks-teks Melayu yang lain seperti *Hikayat Hang Tuah* dan *Hikayat Marong Mahawangsa* (Sejarah Kedah).¹

Dalam kaitan dengan perkembangan Islam pula Pasai memainkan peranan dalam Islamisasi Patani, sebuah kerajaan di Selatan Thailand. Dalam *Hikayat Patani* yang diedit oleh Profesor A. Teeuw dan D.K. Wyatt disebutkan bahwa Raja Phaya Tu Nakpa diislamkan oleh ulama dari Pasai bernama Syaikh Sa'id yang bertempat tinggal di Kampung Pasai, Patani. Dalam disertasi Dr. J. J. Ras yang dipertahankannya pada tahun 1968 di Rijksuniversiteit Leiden, berjudul *Hikayat Bandjar: A Study in Malay Historiography*, kita simak bahwa Raja Bungsu, putera Raja Samudra Pasai pergi ke Majapahit berkunjung kepada kakaknya yang menjadi isteri Raja Majapahit, kemudian mendirikan pemukiman di Ampel-gading, berperan dalam pengislaman Jawa Timur dan kemudian menjadi wali Allah dengan lakab Sunan Ampel. Puteri Pasai yang menjadi isteri Raja Majapahit itu memperoleh cucu, yang juga menjadi wali, yang kemudian terkenal dengan lakab Sunan Giri.² Dalam sebuah naskah Jawa, *Tapel Adam*, nama Pasai tercantum dalam sejarah pendakwah-pendakwah Islam pertama. Juga di dalam naskah itu dikisah-

kan tentang Batara Majapahit yang memperisterikan puteri Raja Pasai dan saudara puteri itu datang ke Majapahit yang kemudian oleh Batara Majapahit dihadiahkan tanah Ampel-gading sebagai tempat kediamannya.³

Berabad-abad lamanya sebelum Amerika Serikat mengeluarkan mata uang logam dan uang kertas dengan ungkapan "*In God we trust*" sebagai aktualisasi Kitab Suci Injil, di Samudra Pasai, Sultan kedua, Muhammad Malik al-Zahir (memerintah 1297 - 1326) mengeluarkan mata uang emas, yang disebut dirham, berdiameter 10 mm dengan berat 0,60 gram dengan mutu 18 karat. Di sebelah muka tertera nama Sultan itu dan di sebelah belakang terdapat ungkapan "*al-sultān al-'ādil*". Ungkapan ini adalah aktualisasi Surat an-Nahl ayat 90 yang terjemahannya berbunyi: "Sesungguhnya Allah menyuruh [kamu] berlaku adil dan berbuat ihsan [kebajikan], memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan; Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran". Lebih dari 200 tahun lamanya, ungkapan *al-sultān al-'ādil* terus tertera dalam dirham Pasai. William Shaw dan Mohd. Kasim Haji Ali mengemukakan bahwa Parameswara, raja pertama Melaka

mengadakan aliansi dengan Kerajaan Samudra Pasai, memeluk agama Islam, dan menikahi puteri Pasai. Menurut kedua penulis ini banyak pedagang dari Pasai mengunjungi Melaka dan memperkenalkan pula sistim penempatan mata uang emas itu di Melaka.⁴

Pasai akhirnya diserap oleh Kesultanan Aceh yang baru bangkit pada tahun 1520-an dan warisan peradaban Islam Samudra Pasai yang kosmopolitan itu diteruskan oleh Kerajaan Aceh Darussalam. Perlu dikemukakan di sini bahwa Bahasa Jawi Pasai atau Bahasa Melayu Klasik, menurut istilah Dr. A. H. Hill, yang terdapat dalam *Hikayat Raja-Raja Pasai*, setelah tiga abad sejak ditulis telah dimanfaatkan oleh Syaikh 'Abd al-Rauf al-Singkili, untuk menulis kitab hukum syara' yang diberi nama *Mir'at al-Tullab fi Tashil Ma'rifat Ahkam al-Syar'iyah li al-Malik al-Wahhab*, yaitu *Cermin bagi Mereka yang Menuntut Ilmu Fiqh pada Memudahkan Mengenal Segala Hukum Syara' Allah*. Dalam Kitab ini ulama besar itu menyebutkan bahwa bahasa yang dipakainya adalah Bahasa Jawi yang dibangunkan kepada Bahasa Pasai.⁵ Sepanjang pengetahuan kita inilah kitab pertama yang berisi perbincangan hukum Islam yang ditulis dalam bahasa Melayu. Lebih dari 150 tahun sejak

dikarang, Kitab ini masih dipelajari di Kerajaan Riau. Raja Ali Haji yang mengarang *Kitab Tuhfat al-Nafis*, ditulis di Kerajaan Riau antara November 1866 - 1872, menyebutkan bahwa Yang Dipertuan Muda Raja Jaafar yang ditabalkan menjadi raja Kerajaan Riau pada tahun 1805 adalah seorang raja yang saleh dan kuat menuntut ilmu. Di antara kitab-kitab yang didalami Baginda tersebutlah *Kitab Mir'at al-Tullab*.⁶

Ikhtiar Syaikh 'Abd al-Rauf untuk meninggikan martabat Bahasa Melayu sebagai bahasa kebudayaan dapat kita lihat dari usahanya menerjemahkan Kitab suci Al-Quran dan menyajikan tafsirnya dalam karyanya yang diberi judul *Tarjumān al-Mustafid* dengan memakai nama 'Abd al-Rauf bin 'Ali al-Fansūrī al-Jāwī. Adapun tafsir yang ditulisnya itu adalah berdasarkan kepada kitab tafsir yang dikarang oleh 'Abdullah bin 'Umar bin Muhammad Syairāzī al-Baidāwī. *Kitab Tarjumān* ini pernah diterbitkan di Istanbul lebih dari seratus tahun yang lalu, yaitu pada 1302 H (1884/1885) terdiri atas dua jilid. Sebagai orang yang pertama sekali menerjemahkan Kitab suci Al-quran ke dalam bahasa Melayu, Syaikh 'Abd al-Rauf telah mengukir jasa yang amat besar, oleh karena melalui karyanya itu pendidikan dan pengajaran Aga-

ma Islam menjadi lebih efektif lagi dan sebagai akibatnya dapat memberi jalan kepada umat di Nusantara ini untuk lebih meningkatkan lagi kualitas iman dan taqwa mereka terhadap Allah swt. Bahasa Melayu yang menjadi *lingua franca* telah diangkat di Aceh Utara menjadi Bahasa Kesusasteraan dan diteruskan melalui pujangga-pujangga ahli sufi Hamzah Fansuri, Syamsuddin al-Sumatra-I, Nuruddin al-Raniri, dan 'Abd al-Rauf al-Singkili menjadi bahasa ilmu dan kebudayaan yang pada akhirnya bahasa Melayu klasik yang datang dari Aceh Utara itu bertransformasi dan menjadikannya tercantum dalam fasal 36 Undang-Undang Dasar 1945.

II

Bila kita telusuri jalan sejarah Aceh kita akan menemukan bahwa agama dan adat sangat dalam berakar dalam masyarakat Aceh. Dalam masyarakat Aceh berkembang semboyan "*Huköm ngön adat han jeuet cré, lagèë dat ngön sifeuet*", hukum syara' atau syari'at dengan hukum adat tidak dapat dipisahkan ibarat tidak terpisahkannya antara Zat Tuhan dengan Sifatnya.

Pandangan dunia (*Weltanschauung*) orang Aceh tercermin dalam tulisan seorang ula-

ma besar Aceh di Abad XIX. Shaikh Abbas Ibnu Muhammad alias Teungku Chik Kutakarang yang menulis dalam kitabnya *Tadhkirat al-Rakidîn* (1889), antara lain sebagai berikut: "*Adat ban adat huköm ban huköm, adat ngon huköm sama keumba; tatkala mufakat adat ngon huköm, nang-groe seunang hana göga*".⁷ Maknanya, "Adat menurut adat, hukum syari'at menurut hukum syari'at, adat dengan hukum Syari'at tidak dapat dipisahkan; tatkala mufakat adat dengan hukum itu, negeri senang tiada huru hara". Beliau menambahkan bahwasanya agama Allah dan raja-raja itu bersaudara keduanya... yakni tiada hasil senang raja-raja yang jauh daripada agama Allah dan tiada hasil senang agama Allah yang jauh daripada raja-raja.⁸ Dalam *Tadhkirat al-Rakidîn* dinyatakan pula bahwa dalam dunia ini ada tiga jenis raja, yaitu: (1) raja yang memegang jabatan lahir saja, yakni yang memerintah rakyat menurut hukum adat kebiasaan dunia; (2) raja yang memegang hukum batin yang memerintah, menurut jalan agama yaitu ahl al-syari'ah dan (3) rasul dan nabi-nabi. Apa yang diperintahkan oleh raja jenis pertama haruslah ditaati, jika perintah itu bersatu dengan ajaran agama. Kalau ajarannya tidak bersesuaian dengan syari'at atau syara'

janganlah perintah itu dituruti. Untuk membela patokan dasar ini, maka ulama ini mengutip hadith Nabi yang menyatakan bahwa kita dilarang menuruti perbuatan maksiat, meskipun leher menjadi taruhannya. Adapun terhadap raja jenis kedua, yakni para ulama, yang merupakan *warasatul anbiyā'* atau pewaris Nabi, akan apa yang disuruhnya mestilah dipatuhi, sebab mereka yang tidak mematuhi akan ditimpa malapetaka.⁹ Di Aceh dikenal konsep-konsep *darōhaka* dan *teumeureuka*. *Darōhaka* adalah perbuatan ingkar terhadap perintah Allah, Rasul, ayah ibu, para wali Allah, raja, para pemimpin agama, suami dan para orang yang lebih tua pada umumnya, dan akan menerima akibat buruk bagi siapa yang melakukan perbuatan *darohaka* itu. *Teumeureuka* adalah akibat buruk yang akan menimpa orang yang *darohaka* berupa antara lain kutukan, malapetaka, kemalangan, dan bencana.

Teungku Chik Kutakarang melanjutkan: "Bermula agama Allah dan raja-raja [baca: pemimpin-pemimpin pemerintahan] sama kembar keduanya, yakni seperti tali berputar sama dua, maka tiadalah berkata salah satu daripada keduanya jauh daripada satu sama lain.¹⁰ Hal ini masih berlaku di Aceh dalam

satu unit teritorial terkecil yaitu *gampong* (kampung). *Teungku meunasah* adalah pejabat yang mengurus segala sesuatu yang bertalian dengan soal-soal keagamaan (*hukōm*), sedangkan *geuchik* adalah orang yang mewakili adat. *Geuchik* adalah "ayah" atau *embah*, sedangkan *teungku meunasah* adalah "ibu" kepada *gampong* itu.

Dalam kehidupan sehari-hari di kampung orang gemar akan *mupakat* atau *duekpakat* yaitu pertukaran pikiran untuk mencapai kebulatan pendapat dalam mendukung serta melaksanakan sesuatu urusan. Dalam *mupakat* ini diundang juga orang-orang yang dituakan serta tokoh terpandang lainnya yang dapat dianggap mewakili pendapat segenap penduduk kampung itu. Segala sesuatu mengenai kepentingan umum di kampung ini senantiasa diurus bersama antara *geuchik* dengan *teungku meunasah* itu sebagai perlambang antara adat dengan syara'.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas yang masih dapat dicari dalam tradisi kumulatif kehidupan keagamaan orang Aceh dapatlah dilihat dengan jelas bahwa agama adalah merupakan salah satu kekuatan sosial di daerah Aceh, dan usaha apa pun jua yang hendak dijalankan hanya dapat berhasil baik bilamana pemimpin-pe-

mimpin pemerintah dan agama bersatu dalam kata dan perbuatan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Ada suatu hal yang mustahak kiranya dikemukakan dalam tulisan ini. Ulama besar Tgk. Chik Kutakarang bersama tiga ahli tasawwuf Aceh yang juga ahli *kasyaf*,¹¹ yaitu Al-'arif Billah Sayyidil Abu Bakar al-Idrus al-mulaqqab Tgk. Di Bukit, Qadhi Mu'azzam Syaikhul Islam Syaikh Muhammad Marhaban Taballahu Lhambhuek, dan Syaikh Muhammad Amir Kurdi Turkia pada 12 hari Rabiul Awwal 1283 H (14 Juli 1866 M), hari kelahiran Nabi Muhammad SAW meninggalkan amanah kepada anak cucunya, yang patut jugalah menjadi renungan kita bersama dewasa ini yang bunyinya sebagai berikut:

Bahwa dalam Islam dunia ini mulai pada masa zaman dahulu dan pada masa zaman sekarang hingga pada zaman akan datang turun menurun yang sangat dihajati dan diharapkan oleh sekalian ummat manusia yaitu pertama-tama adil hukum dan kedua aman negeri dan ketiga senang rakyat dan keempat makmur dan kelima perjanjian dan pelajaran nasihat yang benar lagi teguh. Maka yang sangat dibenci dan amarah sakit hati sekalian ummat manusia, yaitu:

pertama, zalim dan
 kedua tidak ada keadilan dan
 ketiga memberi susah atas
 rakyat dan
 keempat tidak memperbuat
 makmur dalam negeri, dan

kelima mengubah janji dengan rakyat dan pelajaran nasihat yang tidak baik dan teguh setia.

Huru hara terjadi dalam dunia ini disebabkan oleh lima perkara yang tersebut tadi, yaitu "keluar sekalian perbuatan yang mungkar, dengki dan khianat dan tamak hasutan fitnah". Keempat wali Allah itu meneruskan amanatnya sebagai berikut.

Maka Allah Ta'ala Tuhan Rabbul 'Alamin menurunkan bala yang bermacam-macam, tetapi manusia pada masa itu tidak memikirkan dengan seluas-luas dan dengan faham yang mendalam. Pegang olehmu agama Islam yang suci lagi benar, selamat dunia akhirat, dan taat setialah pada *qanun syara'* [Undang-Undang Dasar] Kerajaan al-Jumhuriyyah al-Indonesiah dan jangan sekali-kali *bughat* yakni durhaka melawan Kerajaan al-Jumhuriyyah al-Indonesiah yang sah dan jangan sekali-kali dalam kerajaan mendirikan lagi kerajaan dan dalam negeri mendirikan negeri. Maka ingat jangan membikin pecah belah ummat manusia dalam satu-satu kerajaan yang sah dengan keputusan *ijma' mufakat alim ulama'* yang ahli *sunnah wal-jamaah* dan sekalian orang yang besar-besar yang cerdik ahli akal bijaksana faham luas dan fikiran yang tajam dan mendalam dan jernih hati dan sehat otak dengan dingin beserta rakyat yang terbanyak. Maka inilah yang *mu'tamad saheh sah benar*. Maka yang diluar yang tersebut ini, maka itulah *bughat*, maka tiap-tiap *bughat* berhak mesti Kerajaan al-Jumhuriyyah al-Indonesiah menghancurkan

kan dan menghilangkan dan menenyapkan tiap-tiap *bughat* walau siapa-siapa sekalipun. Jangan diam. Wassalam.

III

Pada tahun 1873 Kerajaan Belanda memaklumkan perang kepada Kerajaan Aceh, perang dahsyat yang memakan waktu sekurang-kurangnya 40 tahun lamanya. Menurut Paul van 't Veer, pengarang berbangsa Belanda, tidak kurang dari 37.000 orang terbunuh di pihak Belanda, dan tidak kurang dari 70.000 orang korban tewas di pihak Aceh, sampai dengan tahun 1914 sahaja. Perang melawan Belanda itu dapat berlangsung sedemikian lama, oleh karena perang itu dijiwai oleh Ideologi Perang Sabil. Mereka yang gugur dalam melawan *kaphé* adalah syahid dan akan masuk surga, diampunkan segala dosanya, dan di dalam sorga ia akan memperoleh segala kenikmatan yang tiada taranya. Peperangan Belanda di Aceh adalah peperangan yang terlama dan terdahsyat dalam sejarah kolonial. Di antara para pemimpin perlawanan terkemuka tersebutlah seorang ulama besar Tgk. Chik di Tiro Muhammad Saman. Semua putera ulama ini syahid, yaitu Tgk. Mat Amin, 1896, Tgk. Di Tungkōb, 1899, Tgk. Mahidin, 5 September 1910, Tgk. D i Bukét, 21 Mei 1910.¹³

Dalam masyarakat patrilineal seperti masyarakat Aceh mati syahidnya semua anak laki-laki, adalah suatu pengorbanan yang luar biasa besarnya.

Adapun selepas proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta, pada tanggal 15 Oktober 1945 atas nama seluruh ulama di Aceh empat orang ulama besar, yakni Tgk. Haji Hasan Krueng Kale, Tgk. M. Daud Beureu-eh, Tgk. Haji Ja'far Sidik Lamjabat, Tgk. Haji Hasballah Indrapuri dengan diketahui oleh Residen Aceh T. Nyak Arif dan disetujui oleh Ketua Komite Nasional Tuanku Mahmud, menyatakan dengan patuh berdiri di belakang pemimpin Ir. Soekarno yang telah memaklumkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Disebutkan juga bahwa mempertahankan Republik Indonesia adalah perjuangan suci dan diyakini sebagai Perang Sabil. Maklumat itu ditutup dengan menyerukan supaya semua patuh atas segala perintah pemimpin bangsa untuk keselamatan tanah air, agama, dan bangsa.

Ketika ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta (RI), diduduki oleh Belanda pada 19 Desember 1948 dan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta bersama beberapa pemimpin lain ditawan oleh Belanda,

keadaan Pemerintah Republik sangat lemah. Terbentuklah Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra Barat untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tiga bulan lebih setelah ibu kota RI diduduki oleh Belanda datanglah undang-an tertanggal 17 Maret 1949 dari Wali Negara Sumatera Timur, Tengku dr. Mansur, kepada Gubernur Militer Aceh, Tgk. M. Daud Beureueh, untuk menghadiri Mukhtar Sumatera yang akan diadakan di Medan pada tanggal 28 Maret 1949. Tujuan Mukhtar itu adalah mengadakan hubungan pertama di antara daerah-daerah dan suku-suku bangsa Sumatera yang berbagai-bagai itu dan menyatakan pengharapan moga-moga perhubungan yang pertama ini berangsur-angsur tumbuh menjadi pertalian yang bertambah-tambah eratnya untuk kebahagiaan bangsa Sumatera dan bangsa Indonesia seluruhnya. Yang diundang ialah Aceh, Tapanuli, Nias, Minangkabau, Bengkalis, Indragiri, Jambi, Riau, Bangka, Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, dan Bengkulu.¹⁴

Sebenarnya ada tiga pilihan bagi Aceh. Pertama, Aceh dapat meninggalkan RI dan bergabung dengan Negara Sumatera yang akan dibentuk, kedua, peluang untuk menyatakan Aceh sebagai sebuah negara merdeka, dan ke-

tiga, tetap berada dalam pangkuan Republik Indonesia. Persepsi Aceh terhadap undangan Negara Sumatera Timur itu termuat dalam surat kabar *Semangat Merdeka* yang terbit di Kutaraja, ibukota daerah Aceh, tanggal 23 Maret 1949, yang memuat pernyataan Tgk. M. Daud Beureueh, Gubernur Militer, Langkat, Aceh, dan Tanah Karo, antara lain sebagai berikut:

Perasaan kedaerahan di Aceh tidak ada, sebab itu kita tidak bermaksud untuk membentuk suatu Aceh Raya dan lain-lain karena kita di sini adalah bersemangat Republikan. Sebab itu juga, undangan dari Wali Negara Sumatera Timur itu kita pandang sebagai tidak ada saja, dari karena itulah tidak kita balas.

Selanjutnya dalam surat kabar itu Gubernur Militer yang berpangkat major jenderal tituler itu menyatakan bahwa:

Kesetiaan rakyat Aceh terhadap Pemerintah RI bukan dibuat-buat serta diada-adakan, tetapi kesetiaan yang tulus dan ikhlas yang keluar dari hati nurani dengan perhitungan dan perkiraan yang pasti. Rakyat Aceh tahu pasti bahwa kemerdekaan secara terpisah-pisah, negara per negara, tidak akan menguntungkan dan tidak akan membawa kepada kemerdekaan yang abadi.

Demikianlah semangat persatuan rakyat Aceh di bawah bendera Republik Indonesia dinyatakan oleh Tgk. Daud Beureueh. Alangkah tepatnya

sikap yang telah diambil oleh Tgk. Daud Beureueh itu. Andaikata tidak demikian tentulah peta Republik Indonesia tidaklah sebagaimana yang kita warisi dewasa ini.

Aceh, yang diberi julukan daerah modal oleh Presiden Sukarno dalam pidatonya pada tanggal 4 September 1959 di Meulaboh, Aceh Barat,¹⁵ pada bulan Agustus 1948 menyumbangkan dua buah pesawat terbang kepada Republik Indonesia, di antaranya satu dikaryakan di Burma, dan menjadi cikal bakal *Garuda Indonesia Airways*. Di samping itu dalam tahun 1949 Aceh juga menyumbangkan dana kepada Pemerintah Pusat Republik Indonesia di Yogyakarta untuk biaya perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, untuk Angkatan Perang Republik Indonesia, dan untuk biaya pengembalian Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta.¹⁶ Pada tahun 1946 rakyat Aceh membeli obligasi nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera dengan harga seratus rupiah, lima ratus, dan seribu rupiah Oeang Repoeblrik Indonesia per lembar.

Dalam Revolusi Nasional 1945 - 1949 Aceh telah mengaktualisasikan dirinya sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Berikut ini kutipan

dari Professor Dr Taufik Abdullah, pejabat senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengenai hal ini.¹⁷

... periode revolusi kemerdekaan nasional dirasakan sebagai bukti dari keterlibatan Aceh dalam "masyarakat bangsa" yang telah mengatasi ke-Aceh-an, dan lebih penting lagi, bagaimana dengan ke-Aceh-an cita-cita nasional dapat dibina. Adalah suatu kebanggaan untuk mengingat kenyataan betapa Aceh merupakan satu-satunya wilayah di tanah air kita yang terbebas dari injakan tentara Belanda, dan bagaimana Aceh demi kesadaran nasional dan *lil-lahi ta'ala* memberikan apa saja yang diperlukan bagi perjuangan nasional merebut kemerdekaan.

IV

Apakah yang terjadi menjelang dan setelah pengakuan kedaulatan terhadap Republik Indonesia?

Berdasarkan ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) tertanggal Kutaraja 17 Desember 1949 No. 8/Des/W.K.P.H. dibentuklah Provinsi Aceh dengan Tgk. M. Daud Beureueh sebagai Gubernur. Akan tetapi Dewan Menteri Republik Indonesia Serikat (RIS) dalam sidangnya tanggal 8 Agustus 1950 memutuskan bahwa sesuai dengan persetujuan RIS-RI wilayah Indonesia dibagi dalam 10 daerah provinsi satu di antaranya adalah Provinsi Sumatra Utara, sedangkan per-

aturan darurat PDRI yang ditan-datangani oleh Mr Sjafruddin Prawiranegara tentang Provinsi Aceh tidak disahkan. Kemudian keputusan pembubaran Provinsi Aceh dibacakan oleh Perdana Menteri M. Natsir di depan corong Radio Republik Indonesia Kutaraja pada tanggal 23 Januari 1951 dengan terlebih dahulu membaca beberapa ayat Qur'an dan hadith Nabi. Tgk. Daud Beureueh dipindahkan menjadi pegawai tinggi yang diperbantukan pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta.

Singkat kisah, setelah terjadi konflik demi konflik, Tgk. Daud Beureueh memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia Daerah Aceh pada 20 September 1953. Setelah beberapa tahun lamanya bertarung terjadilah kontak antara pihak Darul Islam/Tentara Islam Indonesia dengan pejabat-pejabat Republik Indonesia yang diwakili oleh Gubernur Ali Hasjmy (dilantik sebagai Gubernur Aceh oleh Menteri Dalam Negeri Sunaryo tanggal 27 Januari 1957) dan Letnan Kolonel TNI Sjamaun Gaharu, Panglima Komando Daerah Militer Aceh (KDMA) untuk mengadakan gencatan senjata. Sebagai langkah awal tindak lanjut untuk menghentikan permusuhan ditandatangani Ikrar Lam The pada bulan April 1957, yang isinya menjunjung tinggi kehormatan dan kepenting-

an Agama Islam, Rakyat, dan Daerah Aceh. Akhirnya berkat jasa-jasa Wakil Perdana Menteri R.I., Mr. Hardi, yang dengan Surat Keputusannya Nomor 1/Misi/1959 tanggal 16 Mei 1959, lahirlah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang mempunyai otonomi dalam bidang pendidikan, agama, dan adat istiadat.

Pada tanggal 4 Desember 1976 Tgk. Hasan Tiro mendeklarasikan "Gerakan Aceh Merdeka", suatu gerakan yang berorientasi nilai. Tgk. Hasan Tiro berhasil merekrut pengikut yang relatif jauh lebih kecil jumlahnya dibandingkan dengan gerakan DI/TII 1953. Hal ini disebabkan, antara lain, tidak digunakannya ideologi Islam yang menjadi "roh" rakyat Aceh, yang ada kemungkinan dapat berhasil diupayakan untuk mengobarkan semangat *jihad fi sabilillah*. Gagasan Tgk. Hasan Tiro untuk mendirikan negara merdeka di Aceh dikomunikasikannya melalui pamflet-pamflet berbahasa Inggris, Indonesia, Gayo, dan Aceh dengan menyalahkan "orang asing dari Jawa". Kolonel (Purn.) Hasan Saleh dalam bukunya *Mengapa Aceh Bergolak* (1992: 338) menulis bahwa para pendukung Tgk. Hasan Tiro juga melakukan teror di beberapa tempat yang cukup mengge-lisahkan masyarakat.¹⁸

Dalam gerakan 1953, salah

satu sumber ketegangan struktural adalah lenyapnya Provinsi Aceh dan keyakinan-amnya (*generalized belief*) digali dalam Islam yang berabad-abad telah mapan di tanah Aceh dan diaktipkan oleh para pemimpin gerakan itu sebagai salah satu determinan dalam perilaku kolektif yang menghasilkan gejolak sosial. Di lain pihak menurut Tgk. Hasan Tiro adalah dikuasainya Aceh dan kekayaan alamnya oleh orang-orang bukan Aceh dan cara untuk mengatasinya menurut pendapatnya adalah dengan suatu keyakinan-am (*generalized belief*) mendeklarasikan hak *self-determination* untuk mendirikan negara merdeka.

Dalam perjalanan waktu, maka pada tahun 1989 bertambah terasa gerakan Tgk. Hasan Tiro yang hendak menghapuskan UUU 1945 dan Negara Republik Indonesia, mempertinggi provokasi-provokasi yang dapat diinterpretasikan sebagai gangguan-gangguan keamanan. Reaksi Pemerintah Pusat di Jakarta adalah gerakan seperti itu perlu dihentikan sebelum bertambah meluas dan dijadikanlah Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Sayangnya operasi militer yang dijalankan itu dalam pelaksanaannya telah berlangsung tanpa mengindahkan Hak-hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Prof. T. Syamsuddin,

Ketua Panitia Musyawarah Rakyat Aceh dalam *release*-nya tanggal 24 Februari 1999, selama Aceh menjadi DOM dari 1989 sampai 1998, jatuh korban jiwa 8344 meninggal dunia, 875 jiwa hilang, 1465 menjadi janda, dan 4670 jiwa menjadi yatim, diperkosa 34 jiwa, dan cacat seumur hidup sebanyak 298 jiwa, di samping sejumlah harta benda masyarakat sipil hancur dan rusak, yaitu 809 unit rumah, 667 dibakar, dan 112 rusak. Di samping itu dikemukakan pula dalam wacana itu, setelah DOM dicabut, pada waktu Operasi Wibawa 99 digelar, terdapat juga beberapa kekeliruan teknis, seperti pemukulan terhadap tahanan sipil oleh sejumlah oknum ABRI dan juga kerusakan yang terjadi di Pusong, Kandang, Lhok Nibong, dan Simpang Ulim yang mengakibatkan kerugian harta benda sekitar 500 milyar dan korban jiwa sedikitnya 29 jiwa. Ditambahkan pula dalam tulisan itu bahwa kerusakan yang terjadi bertentangan dengan nilai-nilai agama, susila, dan budaya masyarakat Aceh serta kondisi-kondisi demikian "semakin memperdalam luka-luka yang telah ada, memaksa masyarakat kehilangan martabat dan harga diri dan secara sekaligus menghancurkan sendi-sendi budaya, ekonomi, dan ketenteraman masyarakat".

Dari apa yang telah terjadi itu Prof. T. Syamsuddin menyimpulkan sebagai berikut:

Tuntutan demi tuntutan masyarakat Aceh kepada Pemerintah, terutama tuntutan para mahasiswa dan lembaga masyarakat untuk memperbaiki situasi luka yang kritis itu terkesan disambut kurang serius oleh Pemerintah, dan upaya yang dilakukan Pemerintah belum menuju kepada penanggulangan inti permasalahan yang dihadapi rakyat Aceh, yaitu adanya keadilan, tegaknya hukum, dan terangkatnya kembali harkat dan martabat rakyat Aceh sebagai hamba Allah di Republik ini.

V

Kita semua telah mengetahui bagaimana rawannya keadaan di Tanah Aceh dewasa ini. Keinginan yang sungguh-sungguh disertai dengan niat yang tulus dan suci dari semua pihak belum terlambat lagi untuk menyelesaikan kondisi parah yang dihadapi Aceh. Lobi-lobi dengan Pemerintah Pusat dengan segala jajarannya serta Dewan Perwakilan Rakyat untuk dapat diambilnya tindakan-tindakan terpadu yang kongkrit dalam membantu korban DOM, meski sudah agak terlambat, tidak dapat ditunda-tunda lagi. Pemerintah harus membentuk *task force* untuk langkah-langkah kemanusiaan yang kongkrit, misalnya santunan terhadap janda-janda dan anak yatim, dan lain se-

bagainya. Kalau perlu bantuan internasional dalam paket kemanusiaan untuk rehabilitasi Aceh akibat DOM perlu diusahakan segera. Meskipun hal ini terjadi dengan diiringi pula bantuan dari Pemerintah Pusat, belumlah dapat dilenyapkan luka dan duka nestapa rakyat Aceh. Untuk ini penganiayaan dalam bentuk apapun wajib segera dihentikan dan agar diciptakan suasana yang sejuk, aman, dan damai, bebas dari segala intimidasi dan teror.

Segera setelah langkah-langkah awal pekerjaan rehabilitasi, maka Rakyat Aceh yang tidak berdosa wajib memperoleh perlakuan yang adil dengan menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapa-siapa yang bersalah dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia wajib dibawa kedepan mahkamah sesuai dengan undang-undang.

Harapan Rakyat Aceh tentang kesejahteraan dan keadilan belumlah terwujud. Adalah suatu kenyataan bahwa pembangunan lebih terpusat di Pulau Jawa. Pemerataan hanya terlekat di bibir pemimpin-pemimpin bangsa yang berada di Jakarta. Rakyat di Aceh hanya mendapat bahagian yang tidak berarti dibandingkan dengan kekayaan daerah yang berlimpah yang mereka sumbangkan kepada Jakarta. Rancangan Undang-un-

dang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang sedang dibahas oleh Parlemen Republik Indonesia mestinya membawa angin segar kepada provinsi-provinsi yang menyumbangkan kekayaan sangat besar kepada bangsa ini.

Tentang isu yang berkembang dalam masyarakat Aceh dewasa ini, penyelesaian masalah Aceh harus dengan referendum, otonomi seluas-luasnya, atau Aceh merdeka, haruslah kita sangat hati-hati dengan senantiasa mengingat pepatah "pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna".

Sumbangan atau dengan lain perkataan saham kita untuk bahtera Republik Indonesia seperti yang telah disebutkan di muka, antara lain penyebaran agama Islam dari Aceh yang berakibat lahirnya bahasa Indonesia yang menjadi perekat bangsa Indonesia adalah sangat besar. Apakah bahtera yang kita bangun dahulu yang dewasa ini dalam keadaan kritis adalah patut kita tinggalkan begitu saja? Apakah bahtera yang telah kita bangun dengan pengorbanan yang demikian besar dengan keringat, darah, dan air mata, harus kita tinggalkan atau harus kita bakar, karena didalamnya ada tikus-tikus yang menggegoti isi kapal milik kita itu?

Catatan Akhir

- 1 A. H. Hill, Hikayat Raja-Raja Pasai, *Journal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society*, Volume XXXIII, Part 2, June, 1960, hal. 27.
- 2 J. J. Ras, *Hikayat Bandjar: A Study in Malay Historiography*, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1968)
- 3 P. de Roo de la Faille, "Bij de Terreinschets van de Heilige Begraafplaats Goenoeng Djati," *Notulen van de Algemeene en Directie Vergaderingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*, Bijlage X, deel LVIII, 1920, hal. 259.
- 4 William Shaw and Mohd Kasim Haji Ali, *Malacca Coins*, (Kuala Lumpur, Muzium Negara, 1970), hal. 2. Pengeluaran mata uang emas seperti di Pasai ini berpengaruh sampai ke Semenanjung Tanah Melayu di luar Melaka dan juga sampai ke Brunei Darussalam.
- 5 *Mir'at al-Tullab*, edisi Universitas Syiah Kuala, 1971, hal. 6-7.
- 6 Virginia Matheson (ed.) *Tuhfat al-Nafis*, (Kuala Lumpur, Fajar Bakti, 1982).
- 7 Ms. Cod. Or. 8038 University Library, Leiden, The Netherlands, p.68.
- 8 *Ibid.*, pp. 68, 71.
- 9 *Ibid.*, pp. 60-62.
- 10 *Ibid.*
- 11 Tentang pengertian *Kasyaf* ini lihat *Ensiklopedi Islam Indonesia*, susunan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (Jakarta, Jembatan: 1992), hlm. 525-526. Mengenai *Kasyaf* (tersingkap tirai) Prof. Dr. Hamka menulis sebagai berikut. "Apabila diri yang sebenarnya itu telah terlepas dari ikatan syahwat, tegasnya telah dibendung dan dimatikan, maka tersingkaplah tirai itu. Sebab selubung yang menghambat kita akan mencapainya, ialah hawa nafsu dan syahwat itu. Apabila indria lahir telah tertutup, maka dengan sendirinya kian terbukalah perjalanan indria batin. Perjalanan itulah yang bernama *Suluk*. Yang menempuhnya bernama *Salik*. Apabila *Kasyaf* itu telah tercapai, maka dapatlah si *Salik* mengenal alam yang ghaib-ghaib. Sejak dari *Sifat-Rabbaniyah* (33), 'arasy dan kursi, malaikat dan rahasia wahyu, rahasia nubuwat dan roh, dan hakikat tia-tiap

- yang Maujud, baik yang gaib atau syahid (nyata). Pendeknya, mendapatlah dia kurnia keutamaan Tuhan (*Al-Mawahib Al-Rabbaniyah*) dan ilmu yang meliputi (Al-Ulum ul Laduniyah)". Hamka, *Tasauf: Perkembangan dan Pemurniannya*, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1984), hal. 146.
- 12 Perang Aceh tidak berakhir tahun 1913 atau 1914. Sejak tahun 1914 terentang suatu benang merah ke tahun 1942, sebuah jejak pembunuhan dan pembantaian, dan perlawanan bawah tanah sampai yang terang-terangan yang menyebar luas sedemikian rupa sepanjang tahun-tahun 1925 sampai 1927 "Aceh adalah yang terakhir ditaklukkan Belanda dan merupakan yang pertama terlepas dari kekuasaannya. Paul van 't Veer, *De Atjeh-Oorlog*, dikutip dari *Perang Kolonial Belanda di Aceh*, edisi ke-3, 1997, hal. 292-3.
- 13 Teuku Ibrahim Alfian, et al. (eds.), *The Dutch Colonial War in Aceh*, Third edition, revised, 1997, hal. 157
- 14 Teks lengkap undangan itu yang dijatuhkan melalui pesawat udara Belanda, lihat Amran Zamzami, *Jihad Akbar di Medan Area*, Jakarta, Bulan Bintang, 1990, pp. 406-7. Kutipan dalam makalah ini telah disesuaikan dengan EYD.
- 15 Seksi Penerangan/Dokumentasi Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh, *Modal Revolusi 1945*, Kutaraja/Jakarta, Maret 1960, hal. 103.
- 16 S.M. Amin, *Kenangan-kenangan dari Masa Lampau*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hal. 103. S.M. Amin adalah mantan Gubernur Sumatera Utara.
- 17 Taufik Abdullah, "Pengantar" dalam Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hal. 12.
- 18 Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak*, (Jakarta: Grafiti, 1992), hal. 338.